

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk mengambil suatu keputusan. Akuntansi juga dipakai sebagai bahasa bisnis karena informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah mengerti, akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dicatat dilah menjadi informasi yang berguna bagi para penggunanya.

Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan cara yang signifikan dan dinyatakan dalam nilai uang atas transaksi dan peristiwa yang setidaknya berkarakter keuangan dan menafsirkan hasilnya.¹

Ada berbagai segi dari definisi akuntansi yang pertama adalah akuntansi sebagai seni membuat catatan dan kedua mengandung serangkaian prinsip-prinsip ilmiah. Dari segi dualistis dari akuntansi ini dapat dimengerti hanya pada akhir tiap diskusi mengenai akuntansi. Secara singkat, ini disebabkan oleh kenyataan bahwa akuntansi mempunyai tujuan praktis yang tertentu, sungguhpun prinsip-prinsipnya harus didasarkan pada teori yang dipikirkan secara perlahan.

¹ Faiz Zamzami, Nabella Duta Nusa, *Akuntansi Pengantar 1*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hal. 2.

Pada definisi akuntansi diatas akuntansi adalah istilah yang luas yang menunjukkan teori-teori tertentu, asumsi-asumsi mengenai cara bertindak (behavior), peraturan-peraturan dan cara untuk mengukur prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang dibutuhkan dari kegiatan-kegiatan dan tujuan sebuah organisasi. akan tetapi selain definisi singkat ini, akan lebih berarti lagi jika mempunyai suatu uraian tentang sifat akuntansi dan harus dimenegerti akuntansi bukan sebuah pembukuan, pembukuan hany suatu teknik akuntansi untuk mencatat data keuangan menurut suatu metode tertentu.

Akuntansi memiliki arti yang luas dalam arti meliputi pembuatan berbagai teknik, pencatatan interpretasi laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, cara melporkan fakta-fakta usaha dan berbagai teknik untuk mengawasi seluruh jalanya kegiatan organisasidari segi uang maupun kuantitas. Tujuan utama akuntansi adalah memberikan informasi untuk mengambil keputusan kepada manajemen, pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga keputusan yang benar-benar diambil sudah sesuai dengan organisasi atu apa yang harus diperbuat dikemudian hari.

Tujuan akhir dari pengertian akuntansi ini bahwa tata buku merupakan salah satu alat untuk memberikan informasi, terutama mencatat fakta-fakta finansia l dan informasi lain yang berhubungan didalam buku harian dan buku besar yang digunakan untuk menyusun dan menyimpulkan data akuntansi dengan mudah.

Sebagai kesimpulan dari beberapa definisi akuntansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah ilmu pengetahuan terapan dan seni ilmu pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus menurut sistem tertentu, mengolah dan menganalisis catatan-catatan tersebut sehingga dapat disusun sebagai laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pimpinan perusahaan atau lembaga terhadap kinerjanya.²

Akuntansi merupakan sistem informasi, penentuan laba, pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban (accountability), akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Islam merupakan tata nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.³

B. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan berbangsa. Secara etimologis akuntabilitas memiliki akar sejarah yang terkait dengan akuntansi. Meskipun dalam perkembangannya istilah “akuntabilitas” dan “akuntabel” tidak lagi terbatas pada konsep administrasi keuangan melainkan berkembang hingga aspek politik dan tata kelola pemerintahan. Secara ringkas akuntabilitas adalah suatu kondisi ketika suatu

² H. Muhamad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : Almahira, 2005) , hal 2-4.

³ Zulkifli dan Sulastiningsih, *Kerangka Konseptual, Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Islam, Jurnal, JAA Vol 2 No 2*, 1998.

entiitas baik badan maupun individu melakuka tugas atau fungsi yang berada dalam pengawasan pihak lain.⁴

Prinsip Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam kebudayaan kita, umumnya “tanggungjawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban dikaitkan dengan langsung dengan konsep amana, dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang berkaitan, pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.⁵

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak hanya ditingkat nasional tapi juga lokal. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini sebenarnya tidak berjalan sendiri, namun dihubungkan juga dengan prinsip transparansi, efektifitas, dan efiseiensi, partisipasi masyarakat, persamaan, responsivitas, pelaksanaan aturan hukum, konsesnsus dan visi strategis.⁶

Akuntabilitas dalam arti sempit dan dalam arti luas, akuntabilitas dalam arti sempit yaitu dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu

⁴ Pusat Kajian AKN, *Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Negara*, (Pemerintah Pusat : Pusat Kajian AKN Badan Keahlian DPR RI, 2020), hal 5.

⁵ Lantip Susilowati, *Tanggungjawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah*, *Jurnal (IAIN Tulungagung*, 2017), hal 304.

⁶ Kadek Rindi dkk, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Bumdes Teja Kusuma*. *Jurnal Bali Indonesia: Universitas Pendidikan ganesha*.

pada siapa yang bertanggungjawab dan untuk apa organisasi itu bertanggungjawab. Akuntabilitas dalam arti luas yaitu sebagai bentuk kewajiban pihak yang melaksanakan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemberi tugas dan yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban.⁷

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang individu atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau kejelasan. Melalui penerapan prinsip ini suatu proses pengambilan keputusan kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar yang sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, pada prinsip ini sebenarnya dimaksudkan agar kebijakan dan kinerja yang diajalkan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu akuntabilitas membutuhkan perangkat pendukung seperti perundang-undangan (*de-jure*) maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat. Akuntabilitas secara tradisional digunakan sebagai alat untuk mengawasi perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban dan jawaban kepada otoritas eksternal.

⁷ Hanni Andini, 2018, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, (Skripsi Tidak diterbitkan: Yogyakarta Universitas Sanatha Dharma.

Sebagai wujud prinsip akuntabilitas, undang-undang keuangan negara juga menyebutkan adanya kewajiban ganti rugi kepada mereka yang karena kesengajaan dan kelengahan merugikan keuangan negara. maka dari itu prinsip akuntabilitas mengharuskan untuk penganggarn dana di susun sesuai target atau rencana.⁸

Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan oleh pejabat untuk menjelaskan dan memastikan bahwa tindakanya telah sesuai, etis dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas disini lebih menekankan atau mensyaratkan pada pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan mandate yang telah diberikan.⁹

Menurut Wiranto, terdapat tiga dimensi akuntabilitas anantara lain:

- a. Akuntabilitas Politik, berhubungan dengan perintah atau mandate dalam pemilu. Biasanya madat ini di berikan oleh masyarakt kepada para politisi yang berkedudukan lembaga legislatif dan eksekutif di dalam suatu pemerintahan.
- b. Akuntabilitas finansial, lebih memfokuskan kepada penggunaan dana publik dari laporan yang telah di audit secara professional.
- c. Akuntabilitas administratif, menyatakan pada kewajiban untuk menjalankan tugas atau mandate yang telah diberikan da diterima sesuai dengan kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yaitu sebuah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggarannya mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan hal

⁸ Hermien Nugraheni dkk, *Mahasiswa Pelopor Gerakan Antikorupsi*, (Yogyakarta : Group Penerbitan CV budi utama), hal 153.

⁹ Elmi Zusrianti, 2019, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Pada Kantor Wilayah Nagari Tnjung Labuh Tahun 2017*, (Skripsi Tidak diterbitkan)

tersebut harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan kepada pelaksana.

Akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat umum.

b. Akuntabilitas Vertical

Akuntabilitas vertical yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.¹⁰

Dalam akuntansi syariah merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah di muka bumi. Implikasinya dalam dunia bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk alporan keuangan harus lebih diutamakan dari sekedar aspek pembuat keputusan, dengan menjadikan penuaian zakat sebagai aspek utama dalam laporan keuangan, maka dapat dihindari perbedaan kepentingan antara berbagai pihak pemakai laporan keuangan.

Accountability bukan hanya dapat mempertanggungjawabkan secara finansial, secara formal tetapi mencakup tanggungjawab kepada masyarakat,

¹⁰ Hanni Andini, 2018, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, (Skripsi Tidak Diterbitkan: Yogyakarta Universitas Sanatha Dharma.

pemerintah dan kepatuhan kepada peraturan. Upaya untuk meningkatkan accountability dapat dilakukan dengan dengan mengintegrasikan antara data keuangan dan non keuangan, memperluas ruang lingkup tanggungjawab mencakup masyarakat (lingkungan).

Hanifah menjabarkan bahwa dalam aspek pertanggungjawaban meliputi :

1. Pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah swt.
2. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik selaku pemegang amanah.
3. Bekerja adalah merupakan bentuk dari ibadah sesuai dengan norma dan nilai syariah
4. Bekerja dianggap sebagai ibadah amal saleh sebagai dasar mencapai kebaikan dunia dan akhirat.
5. Meyakini bahwa tujuan hidup adalah sebagai khalifah diatas dunia dan bertanggungjawab kepada manusia.
6. Adil kepada seluruh makhluk bukan hanya kepada manusia .¹¹

Menurut Muhamad sebagai implikasinya adalah peran akuntan Muslim adalah peran akuntan Muslim yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diilhami dengan pandangan dunia tentang tuhid, tidak anti laba atau anti dunia, tetapi suatu visi keberhasilan dan kegagalan yang mencakup pada dimensi waktu yang lebih luga, yaitu dunia dan akhirat.
2. Pertanggungjawaban, tidak hanya pada pimpinan tetapi bertanggungjawab kepada tuhan, karena manusia hanya sekedar Hamba-nya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi di dunia dan di akhirat.

¹¹ Lantip Susilowati, *Tanggungjawaban, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah, Jurnal IAI N Tulungagung*, 2017), hal 315.

3. Hubungan, membutuhkan terciptanya hubungan baik antara pimpinan tetapi juga pada pengikut, dan juga hubungan dengan tuhan dengan memenuhi semua kewajiban keagamaannya.
4. Motivasi, memberikan pelayanan yang terbaik dalam aktivitas akuntansinya, seperti amanah, ibadah, amal salih, yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai kemenangan (al-falah) di dunia maupun di akhirat.

Beberapa contoh yang dapat diungkapkan melalui laporan keuangan meliputi : informasi tentang karyawan, tunjangan hari raya dan bonus yang diberikan oleh perusahaan, jam kerja biasa dan jam kerja sewaktu ramadhan, serta perbedaan jam kerja, ruangan wanita dan laki-laki. Aspek sosial : penerapan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq dan bantuan lain untuk masyarakat luas. Shadaqah) secara baik dan proporsional sesuai dengan alokasinya, serta bantuan-bantuan untuk kegiatan masyarakat lainnya dalam bidang pendidikan, keamanan dan lain sebagainya.

Dalam membuat laporan keuangan dari akuntansi syariah harus memuat unsur-unsur : *cas flow statement, current value balance, sheet, dan value added statement (VAS)*. *Value added statement* inilah kalau dalam akuntansi konvensional disebut laporan laba-rugi. Akan tetapi, dari keduanya ada perbedaan pada laporan nilai tambah yang ada dalam VAS yang diciptakan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Dengan konsep yang diambil yang

telah di internalisasikan dengan nilai-nilai Islam diharapkan akuntansi syariah akan dapat memenuhi kriteria tanggung jawab, keadilan dan kebenaran.¹²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjaawaban atas pembuatan laporan keuangan dipemerintah pusat maupun daerah. Di samping itu pola pertanggungjawaban (akuntabilitas) harus meliputi hal sebagai berikut:

1. Integritas Keuangan

Integritas dapat didefinisikan sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Laporan keuangan memiliki informasi yang dibutuhkan dan nantinya akan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen. Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas atau keandalan.¹³

2. Pengungkapan

¹² Lantip Susilowati, *Tanggungjawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah, Jurnal IAIN Tulungagung*, 2017), hal 314-316.

¹³ Nor Mubin, *Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah, Jurnal Attaqwa*, Vol.14 NO.2, 2018.

Pengungkapan laporan keuangan merupakan fasilitas untuk mendapatkan informasi penjelasan yang lengkap mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi penjelasan mengenai kesehatan keuangan dapat juga diberikan dalam laporan pemeriksaan . semua materi harus di ungkapkan termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif yang akan sangat membantu pengguna laporan keuangan.¹⁴

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menerbitkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi.¹⁵

Selain pola pertanggungjawaban yang sudah dijelaskan di atas, terdapat indikator dan alat ukur prinsip Akuntabilitas, transparansi, partisipasi adalah:

1. Adanya jaminan hukum dari pemerintah mengenai partisipasi masyarakat.
2. Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif, jelas dan terbuka.

¹⁴ Ery Hidayanti dan Sunyoto, *Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi*, Jurnal WIGA, Vol 2, No.2, 2012.

¹⁵ Riska Fahrul Razi, *Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah daerah Terhadap Akuntan Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah*, Jurnal JOM Fekon Vol.4 No.1, 2017.

3. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan keputusan.
4. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsesus antara pemerintah dan masyarakat.
5. Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.¹⁶

C. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pemakai, maka proses penyajiannya harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Dalam merumuskan standar akuntansi, diperlukan acuan teoritikal yang diterima umum, sehingga standar akuntansi yang ditetapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang akan datang, acuan teoritical ini dapat disebut dengan kerangka konseptual penyusunan lapporan keuangan.¹⁷

Laporan keuangan dunia bisnis maupun pemerintahan sangat begitu krusial (penting) dikarenakan dari laporan keuangan tersebut sejauh mana suatu entitas bisnis atau instansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangannya. Baik buruknya suatu entitas atau instansi lembaga dapat dilihat dari laju arus keungan.

¹⁶ John Fresly Hutahayan, Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik, hal. 74

¹⁷ Zulkifli dan Sulastiningsih 1998, *Kerangka Konseptual pelaporan Keuangan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Yogyakarta : Staf pengajar Stie widya wiwaha.

Laporan keuangan disini merupakan tahapan yang paling akhir dalam pembukuan yang berisikan data keuangan dari suatu perusahaan..

Tujuan dari laporan keuangan yaitu sebagai media penyediaan informasi keuangan atau data keuangan yang bersifat jangka panjang sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang akan dipercayakan kepadanya.¹⁸

Penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Kecuali pengakuan pendapatan (cash basis) mata uang penyajian yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah rupiah.¹⁹

Pengelolaan laporan keuangan merupakan pengelolaan yang dilakukan di suatu organisasi atau lembaga untuk memaksimalkan dana yang ada dan dana yang masuk disetiap periode, lalu bagaimana cara suatu organisasi dapat mengembangkan usaha tersebut. Seperti yang dibahas pada saat ini adalah pengelolaan keuangan dalam organisasi Bumdesma yang suatu usahanya bergerak di bidang simpan pinjam, dimana organisasi tersebut memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman kepada masyarakat umum akan tetapi juga mendapatkan sebuah keuntungan.

¹⁸ Jilma Dewi Ayu N, *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM), Riset dan Jurnal Akuntansi* Vol 2 No 1 Agustus 2017.

¹⁹ Darmanto, *Laporan Pertanggungjawaban Kelembagaan Tahunan Anggaran 2019*, (Bumdesma Sejahtera Mandiri Kec Ngetos Kab Nganjuk, 2019)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan yang lengkap, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (arus kas, atau arus dana, catatan dan laporan lain), serta penjelasan yang merupakan bagian integral darinya. Laporan ini disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja keuangan pada suatu titik waktu, biasanya pada akhir periode akuntansi.

Dalam sebuah perusahaan, laporan keuangan adalah sumber informasi keuangan yang sangat penting guna untuk pengambilan sebuah keputusan agar usaha tersebut tetap berjalan. Dalam sebuah usaha laporan keuangan merupakan sesuatu yang krusial dan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha. Laporan keuangan ini nanti yang akan dijadikan acuan untuk menentukan kesehatan suatu organisasi oleh karena itu keakuratan, keandalan dan relevansi informasi sangat dianjurkan dalam pembuatannya. Berikut tujuan laporan keuangan :

1. Tujuan laporan keuangan

Penentuan tujuan, merupakan bagian terpenting dalam menyusun kerangka konseptual. Biasanya, dalam menetapkan tujuan pelaporan keuangan, tujuan ekonomis dan sosial suatu negara dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomis suatu negara, tujuan dari pelaporan keuangan yaitu sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lain dalam membuat keputusan investasi kredit dan lainnya secara rasional.
- b. Menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengevaluais jumlah, saat dan ketidakpastian penerimaan kas dimasa yang akan datang.
- c. Menyediakn informasi mengenai sumber-sumber ekonomis suatu badan usaha, klaim terhadap sumber ekonomis dan pengaru transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan kondisi yang mempengaruhi komposisi dan jumlah sumber-sumber ekonomis perusahaan tersebut serta klaim terhadap sumber-sumber ekonomis tersebut.

Tujuan dari pelaporan keuangan diatas ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan Amerika serikat, anatra lain, sistem perekonomian yang maju, sistem perbankan yang efisien, pasar modal yang kuat, dan pengakuan penuh terhadap milik pribadi.

Tujun laporan keuangan menurut Islam untuk memenuhi kepentingan terhadap pelaksanaan pembayaran zakat (zakat purpose) sehingga informasi keuangan tersebut harus diarahkan untuk memudahkn semua pihak dalam menghitung zakatnya. Unsur pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan harus lebih dari sekedar aspek pembuatan keputusan, dengan menjdikan penuain zakat sebagai aspek utama dalam pelaporan keuangan, maka dapat

dihindari kepentingan perbedaan kepentingan antara pihak pemakai laporan keuangan.²⁰

Laporan keuangan menurut PSAK, berikut laporan keuangan lengkap menurut Psak 1 (2015:1.3) terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan.²¹

2. Karakteristik Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah di nilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut :

- a. *Relevan*, artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Laporan yang relevan memiliki ciri-ciri, laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*predictive value*), memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja, laporan keuangan dipublikasikan secara tepat waktu (*timelines*)

²⁰ Zulkifli dan Sulastiningsih 1998, *Kerangka Konseptual pelaporan Keuangan dalam Perspektif Islam, Jurnal Yogyakarta* : Staf pengajar Stie widya wiwaha)

²¹ Psak 1 (2015:1.3)

- b. Andal (*Realibility*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan yang andal memiliki ciri-ciri disajikan secara jujur, dapat diverifikasi (*veribility*), dan netral dalam penyajian.
- c. Dapat dibandingkan (*comparability*), artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain sejenis.
- d. Dapat dipahami (*Understndbility*), artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.²²

D. Badan Usaha Milik Desa Bersama

Badan usaha milik desa atau Bumdes adalah badan usaha yang bercirikan desa dan didirikan secara kolektif oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Yang mana badan usaha ini memiliki tugas untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di didesa, yang dimaksud usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi seperti, simpan pinjam jasa keuangan, persewaan peralatan persawahan, usaha mikro kecil seperti usaha perdagangan dan usaha rumahan.

²² Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan keuangan Sektor Publik*,

Pendirian Bumdes dilandasi di dasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. berkenan dengan perencanaan dan mendasarkan prinsip transparansi dan akuntabel dengan mekanisme member-base dan self help.

Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Pertanggungjawaban pelaksanaan Bumdes diatur dalam Pemendes No. 4 tahun 2015 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “pelaksanaan Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Bumdes kepada penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh kepala desa.”²³

Pengertian Bumdes dalam Undang-Undang Desa pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang desa; badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya Bum desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usah yang lainnya untuk sebesar-besarnya masyarakat desa.

Bumdesma adalah badan usaha milik desa yang di kelola lebih dari satu desa secara bersama-sama. Bumdesma menjadi wadah atau badan usaha yang dilakukan secara kerja sama antar desa dua desa atau lebih.²⁴

1. Gambaran Umum Organisasi

²³ Agus Taufik Hidayat dkk, *Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang, Jurnal COMVICE*, Vol 2 No 1, 2018.

²⁴<https://sedesa-id.cdn.ammproject.org/v/s/sedesa.id/pengertian-bumdes-dan-bumdesma-bumdes-bersama/amp/>? Diakses pada hari minggu pk1 19.20

Peraturan bupati Nganjuk nomor 12 Tahun 2016 tanggal 25 april 2016 tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dalam peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Unit pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit usaha BUM Desa Bersama yang melaksanakan operasional Program pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat dan sebagai pelaksana mandat dari BKAD melalui musyawarah antar desa/ kelurahan yang mengkoordinasikan kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan program pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat.

Peraturan bupati Nganjuk nomor 13 Tahun 2016 tanggal 26 april 2016 tentang pendirian, Revitalisasi kelembagaan dan tata kelola, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Revitalisasi adalah upaya memperkuat kelembagaan dan tata kelola BUM Desa bersama agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan daerah kabupaten Nganjuk nomor 2 Tahun 2016 tanggal 21 juli 2016 tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa unit pengelola kegiatan yang selanjutnya singkat UPK adalah unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bersama yang melaksanakan operasional program pemerintah Berbasis pemberdayaan masyarakat dan sebagai pelaksana mandate dari BKAD melalui musyawarah antar desa

/kelurahan yang mengkoordinasikan kegiatan antar desa termasuk melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan program pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat.

Bumi Desa Bersama sejahtera mandiri sudah terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama pare, sehingga saat ini telah memiliki NPWP a/n Bumdes Bersama Sejahtera mandiri dengan alamat Dusun Kuncir RT. RT 002 RW 004 Desa Kuncir Kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

2. Maksud dan Tujuan :

Maksud dan tujuan berdasarkan Peraturan Bersama 9 (Sembilan) kepala desa sekecamatan Ngetos nomor 1 tahun tahun 2017 adlah sebagai berikut:

- a. Pendirian BUM Desa Bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung kegiatan perekonomian yang berbasis pemberdayaan yang berasal dari pemerintah.
- b. Meningkatkan perekonomian desa
- c. Mengoptimalkan aset antar Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan kelurahan
- d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam usaha antar desa dan/ dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Antar Desa dan / atau utamanya masyarakat miskin.
 - i. Melindungi dan melestarikan aset PNPM Mandiri perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat.²⁵
2. Revitalisasi permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Revitalisasi permodalan BUM Desa Bersama berdasarkan Peraturan bersama 9 (Sembilan) Kepala Desa se Kecamatan Ngetos adalah milik sebagai berikut:

- a. Modal awal BUM Desa Bersama bersumber dari aset perguliran PNPM-Mpd yang merupakan milik Bersama masyarakat se Kecamatan Ngetos, yang dipergunakan untuk kegiatan SPP dan UEP.
- b. Modal Bumdesa Bersama dapat berasal dari : Penyertaan modal Desa, Penyertaan modal masyarakat dan pihak ketiga.

c. Jenis Usaha

Revitalisasi jenis usaha dilaksanakan melalui pembentukan usaha baru dan menjadikan kegiatan perekonomian yang berbasis pemberdayaan yang berasal dari program pemerintah menjadi unit usaha BUM Desa

²⁵ Darmanto, *Laporan Pertanggungjawaban Kelembagaan tahun anggaran 2019*(Ngetos Nganjuk: Bumdesma Sejahtera Mandiri, 2019)

Bersama. Revitalisasi unit usaha BUM Desa Bersama Sejahtera Mandiri sebagai berikut :

- 1) UPK kecamatan Ngetos menjalankan perguliran SPP dan UEP
- 2) Unit KUM, menjalankan usaha kredit usaha perorangan berjaminan
- 3) Ketentuan mengenai pengelolaan UPK diatur berdasarkan peraturan atau pedoman/Juknis yang mengatur UPK. Unit usaha yang telah beroperasi secara komersial adalah usaha perguliran yang terdiri dari : Simpan pinjam perempuan (SPP), Usaha ekonomi produktif (UEP) dan Kredit usaha mandiri (KUM).²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian terdahulu	Hasil penelitian	Signifikasi perbedaan
1	Jurnal: (jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No.1, April 2017 Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Teja kusuma Kadek Rindi, Luh Putu Mas Sintia Arsani Dewi, Dyah Ari Puspita Sari, dan Putu Pania Awitiana Jurusan Akuntansi,	Bumdes teja kusuma sudah menerapkan prinsip akuntabilitas ataupun tanggungjawab terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional operasional, baik secara internal maupun eksternal	Pada penelitian sebelumnya prinsip akuntabilitas digunakan sebagai laporan kegiatan operasional pada Bumdes, sedangkan dalam penelitian saya akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban atas laporan

²⁶ *Ibid*, hal 34

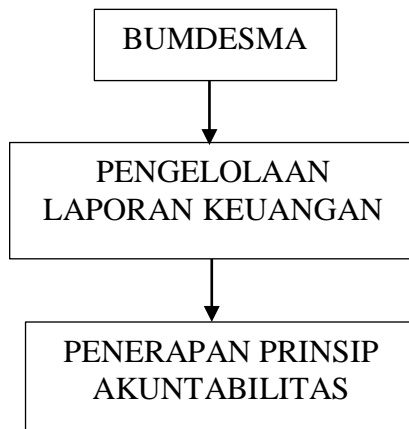
	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali Indonesia		keuangan yng telah dibuat oleh Bumdesma.
2	Jurnal:(jurnal ecopreneur) Vol 2 No. 1 Tahun 2018 Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (studi kasus : Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik) Siti Mahmudah Fakultas Ekonomi Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo Indonesia.	Unit kegiatan Bumdes Desa Sungon Legowo sudah berkembang cukup pesat, laporan keuangan yang dihasilkan masih sederhana berupa catatan pemasukan dan pengeluaran dan kegiatan bumdes ini diperuntukkan dari warga dan untuk warga	Dalam penelitian ini Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik sudah memiliki banyak kegiatan usaha Sedangkan pada penelitian saya berfokus pada usaha simpan pinjam.
3	Jurnal Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Agata Rangga Pamungkas dan Bambang Hariadi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang.	Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan dengan baik, namun perlu dilakukan pembenahan dalam aspek rekrutmen karyawan kontrak atau magang dan perlunya survey kinerja organisasi menurut presepsi public	Pada penelitian ini mengedepankan pentingnya lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan publik, sedangkan dalam penelitian saya untuk menilai laporan keuangan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban di dalam laporan tersebut.
4	Skripsi 2019 Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari pemerintah nagari supayang kecamatan	Hasil penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang teknis Pengelolaan Aset Nagari Supayang	Pada penelitian ini yang dibahas adalah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset di

	<p>salimpaung kabupaten tanah datar</p> <p>Indri Septiani Institut agama islam negeri batusangkar Fakultas ekonomi dan bisnis islam jurusan jurusan akuntansi syariah</p>	<p>dilakukan sudah sesuai dengan teknis dan prosedurnya.akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti sdm,keterbatasan IT dan belum adanya penghapusan terhadap barang milik nagari yang tidak layak pakai sesuai dengan peraturan yang ada</p>	<p>nagari supayang, sedangkan dalam penelitian saya hampir sama yaitu penerapan prinsip akuntabilitass dalam laporan keuangan akan tetapi objeknya pada Bumdesma Sejahtera Mandiri</p>
5	<p>Jurnal : Oca Counstanta Universitas Airlangga Fakultas sosial dan hukum jurusan ilmu politik Natasyah</p> <p>Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Oka Counstanta Natasyah Universitas Airlangga Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Jurusan ilmu politik</p>	<p>Dana bantuan yang diberikan pemerintah dipergunakan dengan sebaik mungkin, dengan adanya prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi menambah nilai jual dari sebuah partai politik</p>	<p>pada penelitian ini hampir sama dengan penelitian saya, pada penelitian ini pengalokasian dana berasal dari pemrintah yaitu bantuan keuangan publik, sedangkan penelitian saya dana berasal dari masyarakat lalu dipergunakan lagi untuk masyarakat namun dalam hal ini aporan keuangan juga harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang sesuai</p>

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah serangkaian konsep hubungan yang dirumuskan oleh peneliti, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Peneliti mendatangi BumDesMa untuk mengetahui keseluruhan data BUMDesMa terutama data mengenai laporan keuangan dan pengelolaannya. setelah menelaah lebih jauh, peneliti melakukan identifikasi terkait dengan penerapan prinsip Akuntabilitas dari laporan keuangan yang ada.